

Pemetaan Kompetensi Perangkat Desa Melalui Asesmen Psikologis dan Teknis dalam Mendukung Penataan Jabatan Berbasis Merit Sistem

Wawan Shokib Rondli*, Edris Zamroni, Umi Khoiriyah, Josep Wibi Khris Setya, Trendy Wijayanti, Yudha Prasetyo

Universitas Muria Kudus

Info Artikel

Penulis Korespondensi

wawan.shokib@umk.ac.id

Keywords:

Psychological assessment; Merit system; Village official position arrangement

Kata Kunci:

Asesmen psikologis; Merit sistem; Penataan jabatan perangkat desa

ABSTRACT

Improving the quality of village officials is an important factor in supporting effective governance and optimal public service delivery. This community service activity aimed to map the competencies of village officials in Kedungdowo Village through psychological assessments and the measurement of technical job knowledge. The methods employed included the Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) personality test, the Lee-Thorpe Occupational Interest Test, and a technical knowledge test related to village governance based on the regulatory framework for village officials in Kudus Regency. A total of 11 village officials participated in the assessment, and the results were analyzed using a triangulation approach that integrated personality traits, job interests, and technical competencies. The findings indicate that each individual demonstrates a distinct competency profile, highlighting the importance of aligning job placement with psychological characteristics and technical abilities. The recommendations generated from this activity can serve as an objective basis for village governments to implement merit-based personnel management, thereby enhancing the effectiveness and quality of public service delivery at the village level.

ABSTRAK

Peningkatan kualitas aparatur desa merupakan faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memetakan kompetensi perangkat Desa Kedungdowo melalui asesmen psikologi dan pengukuran pengetahuan teknis jabatan. Metode yang digunakan meliputi tes kepribadian Edwards Personal Preference Schedule (EPPS), Tes Minat Jabatan Lee-Thorpe, serta tes pengetahuan dasar pemerintahan desa yang mengacu pada regulasi perangkat desa di Kabupaten Kudus. Sebanyak 11 perangkat desa mengikuti asesmen yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi antara kepribadian, minat kerja, dan kompetensi teknis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki profil kompetensi yang berbeda sehingga memerlukan penempatan jabatan yang sesuai dengan karakteristik psikologis dan kemampuan teknisnya. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar objektif bagi pemerintah desa dalam melakukan penataan

perangkat desa berbasis merit system guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Kualitas perangkat desa sangat menentukan efektivitas pelayanan administrasi, pembangunan desa, serta keberhasilan implementasi program pemerintah [1]. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks administrasi publik, kompetensi aparatur memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih profesional dan akuntabel [2]. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara kompetensi individu dengan jabatan yang diemban dapat menyebabkan rendahnya efektivitas organisasi serta menurunnya kualitas pelayanan publik.

Penataan aparatur pemerintahan berbasis kompetensi merupakan bagian dari implementasi prinsip merit system dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik. Sistem merit menekankan bahwa penempatan pegawai harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, serta kinerja individu sehingga organisasi dapat berfungsi secara optimal [5]. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tugas aparatur desa yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga pelayanan masyarakat dan pembangunan desa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang baik akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat [3][4]. Oleh karena itu, upaya pemetaan kompetensi aparatur desa menjadi langkah penting dalam proses penataan organisasi pemerintahan desa.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memetakan kompetensi aparatur adalah melalui asesmen psikologis dan teknis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi karakteristik individu secara lebih komprehensif, baik dari aspek kepribadian, minat kerja, maupun kemampuan teknis. Dengan demikian, penempatan jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data ilmiah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk melakukan pemetaan kompetensi perangkat Desa Kedungdowo melalui asesmen psikologis dan kemampuan teknis. Hasil asesmen diharapkan dapat memberikan rekomendasi penataan jabatan yang lebih sesuai dengan karakteristik individu serta kebutuhan organisasi pemerintahan desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus pada tanggal 17 November 2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Balai Desa Kedungdowo dengan melibatkan 11 perangkat desa sebagai peserta asesmen.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah asesmen kompetensi berbasis triangulasi, yaitu pendekatan yang menggabungkan beberapa instrumen pengukuran untuk memperoleh gambaran kompetensi individu secara lebih komprehensif.

Instrumen pertama yang digunakan adalah Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan psikologis individu yang memengaruhi perilaku kerja. Instrumen ini mengukur berbagai aspek kepribadian seperti *autonomy*, *exhibition*, *affiliation*, *order*, dan *dominance* yang berhubungan dengan gaya kerja seseorang.

Instrumen kedua adalah Tes Minat Jabatan Lee–Thorpe, yang digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan minat kerja individu terhadap berbagai bidang pekerjaan seperti sosial, natural, bisnis, seni, mekanik, dan sains. Selain itu, tes ini juga mengidentifikasi tipe minat seperti verbal, manipulatif, dan komputasional yang berkaitan dengan karakteristik pekerjaan tertentu.

Instrumen ketiga adalah Tes Pengetahuan Dasar Jabatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan teknis peserta dalam memahami tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Tes ini mencakup delapan bidang jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan desa, yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun, serta staf pelayanan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu analisis kepribadian, analisis minat kerja, dan analisis kemampuan teknis. Hasil dari ketiga analisis tersebut kemudian digabungkan melalui proses triangulasi untuk menentukan rekomendasi jabatan utama dan alternatif bagi setiap peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan asesmen kompetensi perangkat Desa Kedungdowo dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 di Aula Balai Desa Kedungdowo. Kegiatan ini diikuti oleh 11 perangkat desa yang terdiri dari berbagai posisi dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Pelaksanaan asesmen dilakukan secara terstruktur melalui serangkaian tes psikologis dan tes pengetahuan teknis yang dirancang untuk memetakan kompetensi individu secara komprehensif.

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Asesmen



Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan tes kepribadian menggunakan instrumen EPPS. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki kecenderungan kepribadian pada aspek *autonomy* dan *exhibition*. Aspek *autonomy* menunjukkan kecenderungan individu untuk bekerja secara mandiri dan mampu mengambil keputusan tanpa ketergantungan tinggi pada orang lain. Sementara itu, aspek *exhibition* menunjukkan kecenderungan individu untuk tampil aktif dalam komunikasi dan interaksi sosial.

Karakteristik kepribadian tersebut sangat relevan dengan tuntutan pekerjaan dalam pemerintahan desa yang membutuhkan kemampuan komunikasi publik serta kemampuan mengambil keputusan dalam berbagai situasi pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa karakteristik kepribadian aparatur memiliki pengaruh terhadap efektivitas kerja sektor publik [3].

Tahapan kedua adalah analisis minat kerja menggunakan Tes Lee-Thorpe. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki kecenderungan minat pada bidang pribadi-sosial dan natural. Minat pribadi-sosial menunjukkan kecenderungan individu untuk bekerja dalam aktivitas yang melibatkan interaksi dengan masyarakat, pelayanan publik, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, minat natural menunjukkan kecenderungan individu untuk bekerja pada aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan lapangan serta hubungan dengan masyarakat secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki kecenderungan minat yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan dalam pemerintahan desa. Menurut penelitian mengenai kompetensi aparatur desa, kesesuaian antara minat kerja individu dengan tugas pekerjaan dapat meningkatkan motivasi kerja serta efektivitas pelayanan publik [4].

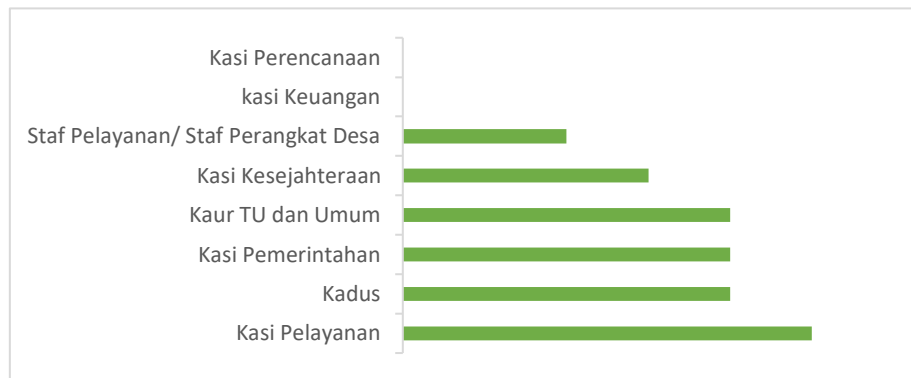
Tahapan ketiga adalah analisis kemampuan teknis melalui Tes Pengetahuan Dasar Jabatan. Hasil tes menunjukkan bahwa sebagian peserta memiliki tingkat penguasaan teknis yang tinggi pada beberapa bidang jabatan seperti Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, dan Kaur Perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap regulasi pemerintahan desa serta administrasi pelayanan publik

Tabel 1. Hasil Triangulasi Asesmen

No	Peserta	Aspek EPPS Dominan	Minat Lee Thorpe Dominan	Jabatan dengan Nilai Teknis tertinggi	Kesimpulan Triangulasi
1	Peserta 1	Exhibition dan Autonomy tinggi,	Minat seluruh bidang rendah–sedang; Tingkat Profesional (99)	Kasi pelayanan, Kadus	Komunikatif & mandiri; teknis kuat di pelayanan & lapangan meski minat rendah
2	Peserta 2	Autonomy tinggi; dan Exhibition, Succorance, Heterosexuality dan Conscience cukup tinggi	Minat seluruh bidang rendah–sedang; Rutin (5)	Merata 73-83%	Mandiri; administratif; teknis merata & terstruktur
3	Peserta 3	Exhibition, Autonomy, dan Concistence tinggi	Natural dan verbal tinggi; menengah (70)	Semua 100% kecuali TU, Umum & Kesra	Komunikatif, konsisten, minat sosial–lapangan dominan; teknis sangat baik

No	Peserta	Aspek EPPS Dominan	Minat Lee Thorpe Dominan	Jabatan dengan Nilai Teknis tertinggi	Kesimpulan Triangulasi
4	Peserta 4	Exhibition dan Autonomy tinggi	Minat sosial & natural sedang; Verbal tinggi; Rutin (50)	100% pada perencanaan, keuangan, pelayanan, kadus	Stabil, komunikatif, minat sedang; teknis kuat di semua bidang
5	Peserta 5	Exhibition dan Autonomy	Natural tinggi; Menengah (60)	Perencanaan, keuangan, pelayanan, kadus (83%)	Minat lapangan kuat, tetapi teknis terbaik pada administrasi & perencanaan
6	Peserta 6	Exhibition dan Autonomy tinggi	Semua rendah; minat rutin (0)	Nilai tertinggi 50%	Cenderung cocok untuk tugas rutin, prosedural, dan membutuhkan arahan
7	Peserta 7	Exhibition dan Autonomy tinggi	Natural & Sains sedang, lainnya rendah; Rutin (40)	Semua 83% kecuali TU dan Umum	Administratif; teknis merata & stabil; minat sedang
8	Peserta 8	Exhibition, Autonomy, dan Consistence tinggi	Pribadi Sosial tinggi, lainnya sedang–rendah; Rutin (50)	Semua 100%	Stabil, sosial tinggi, teknis sangat baik; kuat pada layanan & regulasi
9	Peserta 9	Exhibition, Autonomy, dan Consistence tinggi	Sosial tinggi; Rutin (20)	Semua 100% kecuali kasi pemerintahan	Mandiri, komunikatif, teknis unggul; cocok tugas sosial & lapangan
10	Peserta 10	Exhibition tinggi, Autonomy tinggi, Consistence sangat tinggi	Sosial tinggi, Sains tinggi; Profesional (90)	Rata-rata 83% (Perencanaan, Keuangan, Kesra, kadus, Pelayanan)	Stabil & analitis; teknis mendukung peran regulatif dan pelayanan
11	Peserta 11	Exhibition tinggi, Autonomy tinggi	Natural tinggi, Sains tinggi; Rutin (5)	83% (Pelayanan, Perencanaan, Keuangan, Kadus)	Stabil, analitis; teknis kuat di tata kelola & lapangan

Grafik 1. Distribusi Rekomendasi Jabatan



Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kadus, serta Kaur TU dan Umum merupakan jabatan yang paling banyak direkomendasikan berdasarkan hasil triangulasi asesmen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki kecenderungan kompetensi pada bidang pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat [8]. Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan akan lebih mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selain itu, penerapan pendekatan person-job fit dalam penempatan jabatan terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Ketika individu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan minatnya, maka individu tersebut akan lebih mampu bekerja secara optimal serta memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi [9].

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penerapan sistem penempatan jabatan berbasis kompetensi juga merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di sektor publik. Sistem merit yang diterapkan secara konsisten akan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur serta memperkuat akuntabilitas organisasi pemerintahan [5].

Secara keseluruhan, kegiatan asesmen kompetensi ini memberikan kontribusi penting dalam upaya penguatan kapasitas aparatur desa. Pendekatan asesmen yang digunakan tidak hanya memberikan gambaran mengenai kemampuan teknis individu, tetapi juga karakteristik kepribadian serta minat kerja yang memengaruhi kinerja aparatur.

Dampak utama kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi penempatan jabatan berbasis data ilmiah yang dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan penataan organisasi secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel sehingga berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memetakan kompetensi perangkat Desa Kedungdowo melalui asesmen kepribadian, minat kerja, dan kemampuan teknis. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perangkat desa memiliki karakteristik kompetensi yang berbeda sehingga memerlukan penempatan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan individu.

Pendekatan triangulasi asesmen terbukti mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompetensi aparatur desa sehingga dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi penataan jabatan yang lebih objektif. Penerapan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sutiyo, Maharjan KL. Decentralization and Rural Governance in Indonesia. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-7099-8>
- [2] Adawiyah R. Kompetensi aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7846>
- [3] Hidayati N. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas pelayanan publik. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jap/article/view/5945>
- [4] Fitriani N. Penempatan kerja berbasis kompetensi terhadap kinerja aparatur desa. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/jpalg/article/view/2083>
- [5] Suryanto S. Implementasi merit system dalam manajemen aparatur sipil negara. <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/648>
- [6] Rahman A. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja pelayanan publik desa. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jakp/article/view/105582>
- [7] Susanto E. Kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa. <https://journal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1197>
- [8] Purnomo EP. Village governance reform in Indonesia. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/834>
- [9] Kurniawan RC. Kompetensi aparatur desa dan pelayanan masyarakat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/24274>
- [10] Yuliani D. Profesionalisme aparatur desa dalam pelayanan administrasi masyarakat. <https://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/JAPP/article/view/2067>